

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta asset tak berwujud(Erlina 2015;155).

Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan sector pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah.

Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah
- c. Perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual

Menurut Mayeztika Belanja Modal dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Belanja publik, belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja public merupakan belanja modal yang berupa investasifisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance, pembangunan jalan raya dan jembatan.
- b. Belanja aparatur ,belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, jenis-jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari asset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

c. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat

diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorakseni/budaya/olah raga.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Berdasarkan Penelitian terdahulu (Yasin & Kasino, 2018) mengemukakan bahwa pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat.

2.1.1.1.1 Indikator Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Bangunan

BJJ : Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi”.
- Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

- Belanja asset lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

2.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus-menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah karo di Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Carunia, 2017: 119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

a. Pajak Daerah

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel,
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

c. Hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah

Jenis penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah selain mempekerjakan tenaga kerja daerah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakatnya juga bias dijadikan sumber penerimaan bagi daerah tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai kekayaan daerah. Daerah perlu untuk melihat potensi daerahnya yang dapat dikembangkan menjadi usaha atau perusahaan daerah. Dalam hal ini daerah juga dapat menggandeng badan dari asing guna menjadi partner dalam usaha atau perusahaan daerahnya.

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis kekayaan daerah yang dipisahkan di rinci sebagai berikut:

- 1) Bagian laba dari perusahaan daerah
- 2) Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- 5) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya adalah bersumber dari pendapatan lainnya yang sah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan Bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- 6) Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah

Banyak pendapatan atau pemasukan daerah lainnya yang dapat menjadi pendapatan suatu daerah. Baik itu adalah hal kegiatan bisnis maupun yang non bisnis. Hal ini tentu saja bergantung pada keuletan pemerintah daerah dan kebijakan yang diambilnya. Agar pembangunan berjalan tetap dalam kondisi stabil, maka sumber pendapatan daerah menjadi hal pokok dan utama dalam mengembangkan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dapat digunakan sebagai alat dalam menganalisa tingkat kemampuan otonomi suatu daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017: 23)

2.1.2.1 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Pendapatan Asli Daerah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini Menurut (Nugroho&Rohman, 2012) dapat di hitung dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{PPD} + \text{PRD} + \text{HPKDD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadaan distribusi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Adanya keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ditunjukkan pula dalam sejarah munculnya teori-teori pembangunan ekonomi. Dalam kepustakaan pembangunan ekonomi pasca Perang Dunia II terdapat lima pendekatan utama dalam aliran pemikiran tentang teori-teori pembangunan, yaitu model pertumbuhan bertahap linier, model pembangunan struktural, model ketergantungan internasional, kontrarevolusi pasar bebas neoklasik dan model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan bertahap linier menekankan pada pemahaman bahwa proses pembangunan merupakan serangkaian tahapan pertumbuhan

ekonomi yang berurutan, dan juga menyoroti pembangunan sebagai perpaduan dari tabungan, penanaman modal dan bantuan asing. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahapan tinggal landas, yang ditandai dengan adanya pengerahan atau mobilisasi tabungan yang dijelaskan oleh model pertumbuhan Harrod- Domar. Model yang berkembang selanjutnya adalah perubahan struktural dan ketergantungan internasional yang perbedaannya diantara keduanya lebih pada perbedaan secara ideologis.

Model pertumbuhan yang berkembang pada tahapan berikutnya adalah model pertumbuhan neoklasik, dimana model pertumbuhan Solow menjadi pilarnya. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan output bersumber dari tiga faktor: kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari hal-hal yang bersifat eksogen atau proses-proses kemajuan teknologi yang bersifat independent.

Kelemahan yang terdapat pada teori neo klasik adalah bahwa pengaruh teknologi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh faktor-faktor ekonomi, mengakibatkan munculnya model pertumbuhan yang baru yaitu pertumbuhan endogen. Model ini tetap berdasarkan pada model yang dikembangkan oleh kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, kaum neoklasik, namun berkebalikan dengan pendapat kaum neo klasik, model pertumbuhan endogen mengakui dan menganjurkan keikutsertaan pemerintah

secara aktif dalam pengelolaan perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi umumnya juga disertai dengan terjadinya pergeseran pekerjaan dari kegiatan yang relative rendah produktifitasnya kegiatan yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi secara potensial cenderung meningkatkan produktifitas pekerja, dan meningkatkan unit usaha.

Menurut Sirojuzilam (2015:10), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sector ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indicator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam buku Ekonomi Pembangunan (2017) karya Patta Rapanna dkk, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

2.1.1.3.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (badan pusat statistik) rumus pertumbuhan ekonomi:

$$Y = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%$$

Keterangan:

Y : Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB1 : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sekarang

PDRB0 : Produk Domestik Bruto ADHK tahun sebelumnya

1. Hubungan variable

- Hubungan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi Nilai t hitung lebih besar dari t tabel Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (GROWTH) memiliki pengaruh

yang signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal (Bambang Suprayitno 2015).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sector public secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDBR. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, Seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih. Besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada

gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

- Hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien regresi PAD menunjukkan adanya pengaruh positif PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menerima hipotesis yang menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Putu dan Dwirandra,2014) .

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per Kapita yang lebih baik. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggalipotensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan akan

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bias diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri.

- Hubungan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi

Menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Arti pertumbuhan ekonomi bagi kemandirian daerah.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiscal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ketahun harus semakin dibatasi. Alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini. Tingginya aktivisasi nvestasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan

pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan factor terpenting dalam proses pembangunan, cepa tlamatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaanhasilhutan dan kekayaanlaut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian
4. Faktor Budaya, factor ini berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1	Arini S (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di pulau Kalimantan	Variabel Independen : Belanja Modal Alokasi Umum, Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pulau kalimantan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan masyarakat
2	Utami & Indrajaya (2019)	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Bali	Variabel Independen : PAD dan Belanja Mdoal Variabel Independen : pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017. Sedangkan Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetapi belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.
3	Putra (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel dependen : Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan tidak

				dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara
4	Fajri (2016)	Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera	Variabel Independen : Belanja Modal Variabel Dependen : pertumbuhan ekonomi	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera
5	Rori, et. Al (2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif atau signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2001 – 2013. Secara teori apabila PAD naik, maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan ikut naik.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin banyak pula. Apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo,

2009:67). Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang yang berarti bahwa jika belanja modal naik, maka bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan Wayanto (2017).

Hal ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan pembangunan antara daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat dan daerah yang lemah kemampuan keuangannya. Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah belanja modal, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan pelayanan masyarakat.

Tersedianya dana yang memadai diperoleh melalui pendapatan asli daerah berdampak pada pencapaian hasil maksimal didalam pengembangan suatu daerah otonom yang pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus juga meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerahnya. Namun, pemerintah pusat juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan keuangan antar daerah melalui alokasi dana dengan melakukan transfer dana yang disebut sebagai dana perimbangan.

Penelitian sebelumnya Menurut (Arini S, 2016), (Sularso&Restianto, 2011) bahwa belanja modal memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Indrajaya, 2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2016) menunjukkan hasil penelitian belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. penelitian yang dilakukan oleh (Islamiah, 2015), menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adi (2006:5) mengemukakan bahwa kenaikan Pendapatan asli daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan Pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa pendapatan

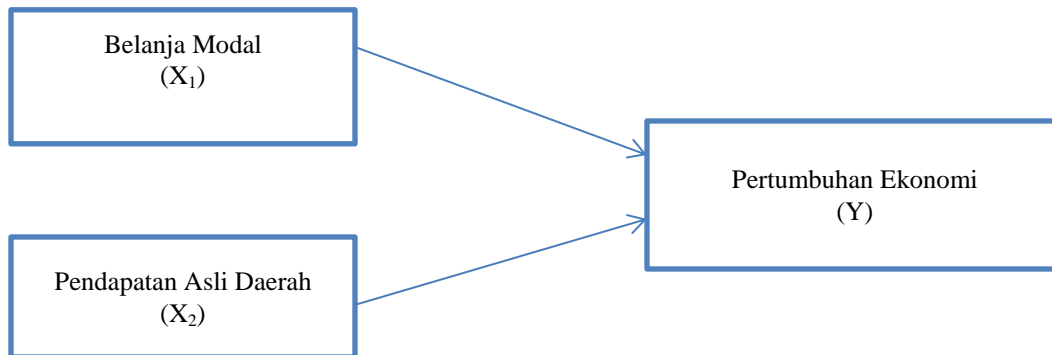
Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Menurut penelitian terdahulu Rori, et. al (2016) menyatakan bahwa :
“Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya”

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggalipotensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan pengembangan hipotesis, maka kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 kerangka pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

- Hipotesis 1 (H1) : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
- Hipotesis 2 (H2) : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi